



Politik Diplomasi Masa Revolusi Menuju Pengakuan Kemerdekaan Indonesia (1946-1949)

¹Ibnu Khaldun, ²Edy Suparjan

^{1,2} Program studi Pendidikan Sejarah STKIP Taman Siswa Bima.

Alamat : Jln. Pendidikan Taman Siswa. No.1 Kab. Bima

Email: tanmaedysu@gmail.com

Info artikel

Article History

Naskah diterima:
28 Januari 2021

Naskah direvisi:
31 Januari 2021

Naskah disetujui:
31 Januari 2021

Kata kunci:

Politik,
Diplomasi,
Revolusi,
Kemerdekaan

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana politik diplomasi awal-awal kemerdekaan terutama pada saat kabinet Syahrir sampai Kabinet Hatta serta menjelaskan bagaimana upaya elit politik Indonesia menyikapi politik diplomasi dalam menghadapi Agresi serta menganalisis peran pihak ketiga dalam diplomasi RI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif adalah untuk mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat. Metode yang digunakan studi pustaka dengan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Kesimpulan penelitian ini, Sikap politik elit Indonesia beragam kelompok pertama yaitu pemerintah lebih mengedepankan jalur politik diplomasi ketimbang perlawanan bersenjata atau merdeka 100 persen. Sikap kelompok pertama ini lebih dipengaruhi pendidikan yang mereka peroleh sejak menempuh pendidikan di Belanda, diantara kelompok pertama adalah; Hatta, Syahrir, Setiadjud, Abdul Majid dan Amir Syarifuddin serta Agus Salim. Kelompok ini berkeyakinan bahwa secara de jure Belanda memang masih kuat dan mendapat dukungan dari sekutunya seperti Inggris dan Amerika. Sementara, kelompok kedua adalah yang memilih cara perlawanan bersenjata atau gerilya dalam mencapai kemerdekaan 100 persen diantara kelompok ini adalah lebih banyak dari tokoh oposisi dan militer seperti Tan Malaka, Panglima Sudirman dan pimpinan-pimpinan partai Masyumi maupun PNI. Pertentangan ini menyebabkan Sudirman memilih Gerilya sebagai cara yang tepat untuk mencapai merdeka seratus persen. Konflik Indonesia dan Belanda pada akhirnya memerlukan keterlibatan Amerika dalam menyelesaikan sengketa kedua negara tersebut. Ini dibuktikan Amerika kedua kali mengeluarkan resolusi PBB untuk menekan Belanda agar mau menyerahkan kedaulatan kepada republik Indonesia walaupun dengan syarat tertentu seperti Belanda belum mengakui negara-negara bagian milik RI serta Papua. Kemudian kemerdekaan Republik Indonesia masih ada sisa utang kepada Belanda.

PENDAHULUAN

Pada masa awal kemerdekaan sejak terbentuknya Kabinet pertama Syahrir, terjadi perbedaan tajam di antara partai-partai yang terbentuk baik antara partai Nasionalis maupun partai yang berhaluan kiri seperti PKI. Posisi Republik berada pada dua pilihan yaitu tetap melanjutkan upaya diplomasi dengan Belanda atau meneruskan revolusi dengan cara perang Gerilya. Saling menyalahkan di antara partai menjadi ritual pada jaman revolusi, tidak terkecuali Kabinet Syahrir

dikecam lantaran perjanjian Linggarjati yang merugikan pihak republik. Kabinet Syahrir pun turun dari kekuasaannya diganti oleh Kabinet Amir Syarifuddin, namun Amir yang mengecam gaya diplomasi Syahrir justru ia pun mengikuti gaya diplomasi yang digunakan Syahrir dengan melaksanakan perjanjian Renville dan nyata-nyatanya Perjanjian Renville tidak mampu memberikan keuntungan di pihak Indonesia justru memberikan keuntungan di pihak Belanda. Akibat dari kegagalan ini pihak partai Masyumi dan PNI menarik dukungan dari kabinet Amir sehingga meletakkan jabatannya dari Perdana Menteri.

Revolusi Indonesia memiliki corak tersendiri yaitu, disisi lain para nasionalis yang berpendidikan tinggi menggunakan pola perjuangan diplomasi dalam mencapai kemerdekaan republik Indonesia, sementara pihak militer dan tentara rakyat memilih perjuangan bersenjata dengan cara gerilya untuk mencapai kemerdekaan. Pada tahap-tahap ini, revolusi Indonesia mendapatkan ujian yang sangat berat, yaitu ketika Indonesia menghadapi Agresi Militer Belanda, di saat itu pula anak bangsa yang tidak suka dengan gaya kepemimpinan Sukarno-Hatta dari belakang menyerang dengan cara melakukan pemberontakan dan sabotase seperti yang terjadi Jawa Barat di bawah komando Kartosuwiryo dan Pemberontakan di Madiun oleh Partai Komunis Indonesia di bawah komando Muso dan Amir Syarifuddin. Lengkap sudah penderitaan yang dialami oleh pihak republik. Namun, dengan kesungguhan dan niat ikhlas para tokoh republik baik yang mendukung merdeka 100 persen dengan cara gerilya maupun dengan cara diplomasi akhir Tahun 1949 Indonesia menuju kemerdekaan dengan syarat-syarat tertentu dari pihak Belanda di antaranya tidak untuk Papua.

Pertentangan elit politik dengan militer mengenai jalur perjuangan semakin rumit, Panglima Sudirman sangat kecewa dengan sikap Sukarno yang memilih ditangkap Belanda ketimbang ikut gerilya bersama Tentara. Sikap Sudirman memang rasional, karena dua kali perundingan, Indonesia dirugikan dan selalu dikecoh oleh Belanda. Dengan tegas Panglima Sudirman mengkritik lewat radiogram yang dikirim ke Syafrudin Prawiranegara dengan mengatakan, *“apakah pantas orang yang berada dalam tahanan atau berada dalam pengawasan tentara Belanda berhak melakukan perundingan dan mengambil keputusan politik buat menentukan nasib republik?”*. Tempo, (2017:120)

Perundingan demi perundingan yang membuat pihak republik selalu dirugikan membuat pihak militer semakin tidak percaya dengan garis politik pimpinan republik. Perang gerilya yang cukup menghabiskan energi, tenaga dan materi membuat Panglima Sudirman menolak gencatan senjata hasil perundingan Roem-Royen, sikap Panglima ini membuat tensi politik antara militer dengan sipil makin tinggi. Pasca perundingan Roem-Royen dan kondisi pemerintahan kembali pulih dan beberapa pimpinan republik kembali ke Istana di Yogyakarta, Panglima Sudirman yang di atas pegunungan dijemput oleh TB Simatupang agar mau kembali ke Istana Yogyakarta. Sudirman saat menuju ke Istana dalam keadaan sangat marah, karena kecewa terhadap sikap politik pimpinan republik, saat memasuki beranda Istana, panglima langsung disambut oleh Presiden Sukarno dengan pelukan, namun Panglima tidak menyambut pelukan tersebut. Dalam pertemuan tersebut Panglima Sudirman menyampaikan amanat tentara yang masih berada di hutan untuk gerilya, mereka menolak gencatan senjata, keesokan harinya Panglima bersama Nasution dan Sukarno kembali bertemu di Istana dalam kesempatan itu pula, Panglima Sudirman menyampaikan bahwa dirinya sudah tidak sehaluan dengan garis politik pemerintah dan akan mengundurkan diri dari dinas militer. Mendengar ucapan tersebut, Sukarno langsung berkata, *“bila pemimpin TNI mengundurkan diri, Soekarno-Hatta yang akan lebih duluan mengundurkan diri”*. Pembicaraan ini tidak ada kesimpulan, Panglima Sudirman dan Nasution kembali ke rumah. Setelah itu, Panglima Sudirman mengundang Nasution agar berkunjung ke rumahnya. Lewat kesempatan itu, Panglima Sudirman lewat Kapten Soepardjo menunjukkan surat pengunduran dirinya. Nasution pun menghampiri Panglima di tempat tidurnya dengan mengatakan, *“saya*

sampaikan persatuan TNI dan Soekarno-Hatta lebih penting, ketimbang strategi perjuangan”. Tempo, (2017:124).

Awal kemerdekaan Indonesia, tokoh pendiri bangsa ini, sudah menunjukkan gaya politik dimata dunia internasional dengan menggunakan konsep “bebas aktif” gaya politik ini merupakan politik yang sangat anti ikut campur negara lain. Ciri khas sejarah awal kemerdekaan. bahwa beberapa menteri yang menjabat kementerian luar negeri seperti H. Agus Salim maupun Syahrir yang menjadi perdana menteri pertama memfokuskan diri dalam menjalin hubungan dengan negara lain seperti India dan Pakistan terutama tujuannya menjalin kerja sama serta mendapatkan pengakuan negara lain agar mengakui kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Karena bagi Syahrir cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia tidak akan sukses tanpa dukungan dari dunia internasional.

Syahrir selaku perdana Menteri Pertama Republik Indonesia yang kita kenal sebagai peletak dasar diplomasi internasional pernah mengejutkan Belanda, ketika ia menggunakan diplomasi beras, pada bulan April 1946 Syahrir mengirim 500.000 (Lima Ratus Ribu) ton beras untuk India yang pada saat itu sedang gagal panen. Upaya yang dilakukan Syahrir merupakan strategi untuk memperkuat posisi Indonesia di mata dunia Internasional serta memperkuat kedudukan Indonesia di negara-negara Asia yang baru merdeka. Selain itu, dalam catatan Tempo, (2017:96) kebijakan Syahrir yang melakukan ekspor Karet dan Copra ke Amerika dan Inggris merupakan kebijakan yang sangat berani, karena Belanda pada saat itu sedang melakukan blokade ekonomi. Pasca Perjanjian Linggarjati dua negara tersebut merupakan yang pertama mengakui kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam perspektif Sejarah gaya politik Diplomasi yang dilakukan oleh elit politik Nasional kita, dilatarbelakangi aspek pendidikan yang mereka dapat di negeri Belanda. Selain itu, pada saat itu, Syahrir sangat paham sekali bahwa secara de jure Belanda masih memiliki kekuasaan di Indonesia. hal ini memberikan peluang kepada mereka untuk membuka komunikasi dengan beberapa tokoh Belanda. Oleh karena itu, tokoh kunci dalam diplomasi Indonesia adalah Syahrir dan Hatta yang pernah mendapatkan pendidikan Belanda.

Tulisan ini berusaha menjelaskan bagaimana upaya diplomasi elit politik Indonesia sebagai gaya khas elit Indonesia yang berpendidikan di Belanda. Penelitian politik diplomasi Indonesia sangat penting dilakukan mengingat kondisi negara Indonesia yang diapit oleh beberapa negara adidaya yang kuat dan tentunya dapat menjadi ancaman yang sangat serius dikemudian hari. Pengetahuan sejarah diplomasi sangat urgen dipelajari sesuai perkembangan jaman. Karena pelajaran diplomasi yang telah lalu akan menentukan sikap dan kebijakan politik internasional bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Adapun tujuan penelitian ini adalah berusaha menggambarkan keseluruhan strategi politik diplomasi Indonesia di awal merdeka sampai diakui kemerdekaan oleh Belanda pada Tahun 1949. Sehingga, rumusan dalam penelitian ini adalah Bagaimana sikap elit politik dalam negeri terhadap Agresi Militer Belanda ? Bagaimana Peran pihak ketiga dalam Diplomasi ?

Untuk menganalisis permasalahan tersebut peneliti melakukan telaah referensi seperti membaca buku-buku Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. George Mc Turnan Kahin. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Ahmad Mansyur Suryanegara. *API Sejarah*. G. Moedjanto. *Dari Pembentukan Pax Neerlandica sampai NKRI*. Seri Tempo 2017 yang membahas tentang Syahrir dan Panglima Sudirman serta menelaah hasil penelitian dalam jurnal-jurnal sejarah yang membahas Agresi Belanda dan Perjanjian Linggarjati sampai Konferensi Meja Bundar. Setelah membaca dan menganalisis kemudian mereduksi dan melakukan verifikasi serta mengambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sikap Elit Politik dalam menghadapi Agresi Belanda

Perjanjian Linggarjati menurut para penentang adalah sebuah langkah mundur yang dilakukan oleh tokoh Indonesia. Karena hasil perjanjian tersebut sangat merugikan Indonesia secara ekonomi. Karena bagaimana juga daerah-daerah yang berproduksi tinggi banyak dikuasai Belanda. Sementara kawasan kelangkaan pangan berada di tangan Indonesia.

Aksi militer Belanda pada tanggal 20 Juli 1947 untuk mengacaukan hasil perjanjian, Belanda bertujuan menguasai wilayah-wilayah yang memiliki produksi seperti pertambangan dan pelabuhan, terutama Jawa dan Sumatera.

Kembalinya Belanda dalam rangka menjajah Indonesia menimbulkan sikap dilematis bagi elit pemerintah Indonesia. Lebih-lebih perbedaan tajam ideologi yang dianut tokoh Indonesia saat itu. Kelompok kiri menginginkan bahwa bangsa Indonesia bergabung dengan Komunis Internasional dalam rangka bersama-sama melawan Blok Barat. Sementara pemimpin Nasional seperti Hatta, Syahrir dan Sukarno tidak ingin Indonesia dikuasai oleh Komunisme. Diantara elit yang sangat gigih menentang politik diplomasi yang dijalankan Syahrir adalah Tan Malaka bersama elit yang tergabung di Organisasi Persatuan Perjuangan.

Pendekatan politik diplomasi yang dijalankan oleh Kabinet Syahrir mendapat tantangan dan perlawanan serius dari kelompok Tan Malaka, bagi Tan Malaka dan kelompok Persatuan Perjuangan Syahrir telah menjual republik ke tangan Belanda serta hal tersebut merupakan pengkhianatan terhadap “kemerdekaan 100 persen” yang diinginkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pihak oposisi lewat persatuan perjuangan mulai serius menyikapi gaya politik Syahrir yang dianggap berpihak pada Belanda. Menurut Ricklefs, (2008:469) ketika perjalanan pulang berkeliling Jawa Timur, mereka ditangkap oleh kesatuan tentara setempat. Sementara menurut keterangan Sejarawan Rusdhy Hoesien dalam Tempo, (2017:88) bahwa sepulang dari Banyuwangi, Jawa Timur setelah meninjau persiapan beras, Syahrir ditangkap oleh sekelompok pendukung Tan Malaka yaitu Mayor A.K. Yusuf Komandan Bataliyon dari Divisi III Yogyakarta dan hal tersebut telah mendapat restu dari Komandan Divisi Mayjen Soedarsono. Belakangan peristiwa ini juga dikaitkan dengan keberpihakan Panglima Sudirman terhadap kelompok Tan Malaka.

Menurut Gie, (2005:98-99) Garis haluan politik Komintern 1930an menganggap pengkomunisan eropa akan cepat setelah perang dunia II, dan akan lebih baik Belanda yang komunis akan lebih menguntungkan membina situasi Indonesia. Maka prinsip tuntutan kemerdekaan Indonesia akan lebih bijaksana disalurkan dalam hubungan Uni-Belanda. Dan hal tersebut, sudah dilakukan oleh Maruto dan Setiadjud 1946, sebelum kembali dari Belanda telah melakukan komunikasi bersama Prof. Schermerhon dan Prof Logeman, pokok-pokok pembicaraan yaitu status hubungan Belanda-Indonesia dalam status Uni. Dapat dimengerti bahwa kelompok yang paling setuju dalam menggunakan politik diplomasi adalah mereka yang pernah mendapatkan pendidikan Belanda.

Pendapat Sok Hok Gie diatas sejalan dengan pendapat Taylor dan Anderson dalam Buku Moedjanto, (2003:333) Pada awalnya pihak Belanda dalam hal ini diwakili oleh Van Mook kesulitan memilih diantara tuntutan Inggris Christison pada 1 Oktober agar segera mengajak pemimpin-pemimpin Indonesia untuk berunding. Begitu pun juga, Admiral Mountbatten ketika di Singapura mendesak Van Mook agar segera berunding. Namun, pada pertama kalinya Van Mook bertemu dengan pihak Indonesia dan kebetulan dihadiri oleh Sukarno. Hal ini, membuat pihak pemerintah Belanda di Den Haag marah dan melarang Van Mook berunding pemimpin Indonesia yang berkolaborasi dengan Jepang. Selain itu, desakan-desakan berunding memang langsung datang dari negara adidaya seperti Perdana Menteri Inggris, Ernest Bevin pada tanggal 23 November 1945 dan Kementerian Luar negeri Amerika Clark Kerr pada tanggal 19 Desember

1945. Pada intinya pembicaraan-pembicaraan mengenai kesiapan berunding memang sejak awal sudah dipersiapkan di Belanda dengan cara mencari pemimpin Indonesia yang bukan kolaborator Jepang.

Setelah perjanjian informal pertama Van Mook ditegur oleh Den Haag. Kini sepuluh hari dari Belanda ke Indonesia Van Mook melakukan perundingan kedua 10 Februari di Jakarta dan disaksikan oleh Clark Kerr. Pada intinya perjanjian memuat pokok yaitu; setelah satu periode tertentu masa peralihan Indonesia diberi hak menentukan nasib sendiri, pihak Belanda bermaksud mendirikan *Commonwealth*, begitu pembentukan *commonwealth* terlaksana, pihak Belanda memperjuangkan Indonesia agar masuk di PBB. Kemudian, menurut Moedjanto, (2003:335) ketika Van Mook bertemu lagi Syahrir dan menjelaskan kembali pada tanggal 22 Februari 1946 bahwa pentingnya sejarah hubungan Indonesia-Belanda dirumuskan bagi tercapainya perkembangan politik di Indonesia dan kelebihanannya *Commonwealth* lebih banyak unsur Indonesianya ketimbang *Volksraad* dahulu, kata Van Mook.

Agresi Militer I merupakan reaksi dari Perjanjian Linggarjati yang tidak memberikan peluang dan keuntungan bagi Belanda dari segi ekonomi, karena beberapa wilayah strategis belum dikuasai. Perjanjian kembali digelar pada tanggal 8 Desember 1947 di atas dek kapal USA *Renville*. Perjanjian *Renville* adalah sebuah upaya agar menemukan rumusan baru tentang penyelesaian konflik Indonesia dan Belanda. Namun, pada akhirnya perjanjian *Renville* ini dilanggar oleh pihak Belanda, komisi Jasa baik yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB tidak diindahkan oleh Belanda.

Bukti keseriusan Belanda adalah menggempur seluruh wilayah dan menguasai kota, membunuh hanguskan Republik serta menangkap seluruh pemimpin Nasional. Secara bersamaan, pihak Belanda juga menggunakan pola adu domba terhadap elit nasional, ini terlihat pada delegasi perwakilan Belanda merupakan orang Indonesia. Di sisi lain juga, upaya adu domba yang dilakukan oleh Belanda dengan mendirikan Negara Pasundan, Negara Kalimantan maupun Indonesia Timur. Secara langsung Indonesia dibagi-bagi menurut selera Belanda. Kebijakan pembentukan negara federal ini dapat ditafsirkan sebagai upaya Belanda memecahbelah republik dengan tujuan akhir asas negara kesatuan di Republik menghilang.

Berdasarkan penjelasan David Charles Andersson, (2008:10) pada saat Perjanjian *Renville* secara ekonomi sangat merugikan pihak Indonesia, karena daerah-daerah yang menjadi penghasil utama pertanian seperti Jawa Barat dan Jawa Timur menjadi milik Belanda. Indonesia hanya memiliki bagian tengah pulau Jawa yang merupakan daerah kekurangan pangan. Blokade ekonomi yang dilakukan Belanda memang sukses, menurut kesaksian Kahin, (2013:356-357) yang pernah datang ke Indonesia pada tahun 1948 menyaksikan di mana masyarakat kota maupun desa masih menggunakan pakaian yang terbuat dari kain goni. Di mana gaji pegawai negeri rendah hanya 70 sampai 160 rupiah per bulannya. Bahkan, Koesoemah Atmadja seorang kepala Pengadilan Tertinggi yang memiliki gaji 700 rupiah sebulan tidak mampu menafkahi anaknya secara sehat sehingga anaknya mengalami kebutaan disebabkan kekurangan gizi. Kondisi Indonesia pada saat Agresi sangat parah, menyebabkan beribu-ribu orang Jawa melarikan diri membawa harta benda mereka yang dapat dibawa.

Ternyata Perjanjian *Renville* merupakan sebagai uji coba Belanda agar mengukur kekuatan pihak republik, terbukti Belanda melancarkan kembali Agresi yang kedua dengan target menangkap seluruh pimpinan politik Indonesia serta membunuh hanguskan republik. Beberapa pimpinan Indonesia seperti Sukarno, Hatta, Syahrir dan Agus Salim ditangkap lalu dibuang di Prapat dan Berastagi Sumatera. Namun sebelum itu, Sukarno-Hatta telah menyerahkan mandat kepada Syarifuddin Prawiranegara sebagai Ketua PDRI agar menjadi Presiden dalam keadaan darurat dan memimpin republik di Sumatera Barat. Sementara militer dalam hal ini TNI di bawah

pimpinan Panglima Jenderal Sudirman tetap terus melakukan perlawanan dengan cara bergerilya dan tidak sudi melakukan perundingan dengan pihak Belanda.

Beberapa efek lain dari Perjanjian Linggarjati maupun Perjanjian Renville yaitu kekecewaan beberapa tokoh pejuang Islam seperti Kartosuwiryo bekas pengurus Masyumi wilayah Jawa Barat. Menurut Kartosuwiryo TNI bukan hijrah atau Long March menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur akan tetapi melainkan melarikan diri meninggalkan Jawa Barat. Menurut Firmansyah, (2011:116) menyatakan bahwa pimpinan DI/TII ini TNI sengaja meninggalkan masyarakat Jawa Barat, faktor inilah sebagai penyebab Kartosuwiryo mendirikan Negara Islam Indonesia. ini yang saya maksudkan sebagai bentuk kekecewaan di antara tokoh nasional akibat dari hasil perundingan Renville yang merugikan bangsa Indonesia. Karena bagi Kartosuwiryo daerah Jawa Barat bukan milik republik serta ketika Sukarno-Hatta ditangkap oleh Belanda, Kartosuwiryo menganggap bahwa republik sudah bubar.

Di tengah menghadapi Agresi Pemerintah Indonesia juga menghadapi tantangan internal yaitu pemberontakan PKI dibawah pimpinan Muso yang bergabung dengan Amir menghimpun kekuatan lewat FDR dan melakukan pemberontakan dan pembantaian terhadap warga sipil di Madiun. Pemberontakan ini dengan cepat di atas oleh militer di bawah komando Nasution dan TB Simatupang. Menurut David Charles Anderson bahwa pemberontakan Madiun puncak dari konflik internal Tentara.

Tentu kita akan bertanya, mengapa golongan kiri sangat mudah bekerjasama dengan Belanda dalam hal menerima perjanjian Linggarjati maupun perjanjian Renville. Beberapa Minggu sebelum masuk Jepang ke Indonesia, Menurut Gie, (2005:224) pada saat itu Idenburg selaku Gubernur Hindia Belanda memikirkan sangat penting dibuatkan organisasi aparat gerakan bawah tanah, yang diberikan mandat adalah Charles Vander Plass dan jaringan ini diberikan kepada Amir saat itu pegawai Ekonomi di Batavia.

Menurut Gie, (2005:230) bahwa Konflik internal golongan kiri karena perbedaan haluan yaitu Stalinis diwakili Muso dan Komunis Nasional diwakili Tan Malaka. Tekanan-tekanan yang dilakukan kelompok FDR memaksa pemerintah melepaskan Tan Malaka dari penjara. Efek dari konflik internal tersebut, memaksa beberapa tokoh seperti Amir dan Setiadjid mengaku bahwa mereka memang bekerjasama dengan Belanda dan arsitek dibalik perjanjian Linggarjati dan Renville. Tanpa ragu-ragu Amir mengakui bahwa ia pernah menerima uang dari Vander Plass sebanyak 25.000 Golden untuk menyusun gerakan bawah tanah. Sementara Setiadjid penanggungjawab terhadap ide Uni Indonesia-Belanda.

Peran pihak ketiga dalam Diplomasi RI

Kabinet Syahrir memang sangat fokus dalam menjalankan politik diplomasi tujuannya adalah menuju kemerdekaan serta mendapat pengakuan dunia internasional. Menurut Rahman, (2018) Agus Salim yang piawai berbahasa Inggris dan Arab pada tanggal 23 Maret 1947 menghadiri *Inter-Asian Relations Conference* sebuah konferensi hubungan asia. Sebagai Menteri Luar Negeri Muda dalam Kabinet Syahrir II Agus Salim terus menggalang dukungan negara-negara timur tengah seperti Mesir, Siria dan Libanon. Mesir sebagai bentuk dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia menjalin kerjasama perdagangan dengan Indonesia dan membuka Kantor Konsulat Indonesia di Kairo. Kemudian, pada 14 Agustus 1947 Syahrir bersama Agus Salim menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB di Lace Succes. Pada kesempatan ini Perdana Menteri Syahrir menyampaikan pidato yang sangat menggetarkan serta menentukan posisi Indonesia di PBB. Menurut Des Alwi dalam Catatan Tempo, (2017:108) di PBB Syahrir berdebat dengan Van Kleffens perwakilan Belanda yang menuduh perilaku republikan yang tidak beradab. Syahrir membantah dan menyampaikan bahwa Belanda jelas telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian Linggarjati, diakhiri kalimat Syahrir menyatakan, “Belanda

menyampaikan tuduhan tanpa bukti”. Ketika tampil di dunia internasional ini Syahrir diberikan julukan “Sang Atom” oleh Naidu wartawan India yang sempat menghadiri sidang PBB.

Menurut Catatan Kementerian Luar Negeri Indonesia bukti keseriusan Kabinet Syahrir bahwa pada tahun 1947 Syahrir mampu melakukan terobosan yang menembus dunia di antaranya pada bulan Maret 1947 mengunjungi Konferensi inter-asia bersama Agus Salim kemudian pada bulan yang sama yaitu Agustus 1947 menghadiri sidang PBB sekaligus mengirim Beras ke India. Di Tahun 1947 juga Kantor urusan Indonesia didirikan di Singapura dan Oktober Komisi Tiga Negara menjalankan mandat dari PBB.

Perlu ditegaskan di sini mengenai sikap Amerika sebagai negara penjaga keamanan dunia. Di satu sisi Amerika harus mempertahankan kebebasan negara sekutunya seperti Belanda sementara disisi lain juga harus memberikan kebebasan kemerdekaan bagi negara-negara terjajah. Posisi dilematis ini membuat Amerika tetap bersikap netral sampai tahun 1948. Untuk menjembatani kedua negara yang konflik Amerika membentuk komisi jasa baik atau KTN yang diwakili Amerika, Belgia dan Australia. Bahkan pihak Amerika menganggap bahwa Indonesia belum siap untuk merdeka. Hal ini, karena Indonesia belum pulih saat perang kemerdekaan dan pada saat itu sedang menghadapi guncangan dari dalam negeri yaitu pemberontak PKI Madiun. Hal lain, yang perlu ditambahkan di sini adalah secara de facto eksistensi republik Indonesia diperkuat adanya pemerintahan darurat republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat dan pemerintahan jauh di India. Menurut, Suryanegara, (2016:265-268) perjuangan pembentukan pemerintahan darurat ini berkat keberhasilan Syarifuddin Prawiranegara dan A.N Palar yang pada saat itu menjadi wakil Indonesia di PBB. Pembentukan pemerintahan darurat dan pemerintahan pelarian di India berdasarkan Kawat yang dikirim oleh Sukarno Hatta tertanggal 19 Desember 1948. Kawat pertama ditujukan kepada Mr. Syarifuddin Prawiranegara dan Kawat kedua ditujukan kepada tiga orang yaitu, Prof. Dr. Soedarsono, Palar dan Mr. A.A. Maramis di New Delhi.

Amerika mulai serius memperhatikan konflik Indonesia dengan Belanda ketika mendengar kesuksesan Kabinet Hatta dalam menumpas PKI Madiun yang didalangi oleh Muso dan Amir. Ditambah lagi kubersinggungan Amerika terhadap Agresi kedua pihak Belanda yang disaksikan langsung pihak komite jasa baik yang masih berada di Kaliurang pada saat itu. Hal ini, menurut Ricklefs, (2008:484) pengaruh Agresi kedua tersebut, sehingga pada tanggal 22 Desember 1948 pihak Amerika mulai tegas menghentikan pemberian bantuan dana kepada Belanda dimaksudkan terhadap pengeluaran di Indonesia. begitu pun kabinet-kabinet negara federal seperti Negara Indonesia Timur dan Pasundan mengundurkan diri mereka sebagai protes dari Agresi kedua oleh Belanda. Rencana licik Bell pun tidak tercapai karena banyak negara-negara federal tidak mendukung, apalagi mengetahui serangan umum 1 Maret yang dilakukan oleh Mayjen Suharto dan pasukannya terbukti berhasil.

Untuk pertama kali Amerika mengeluarkan Resolusi pada tanggal 24 Desember 1948 adapun bunyi resolusi adalah mendesak kedua belah pihak untuk menghentikan tembakan-menembak dan mendesak pihak belanda agar melepaskan pemimpin politik Indonesia yang ditahan oleh belanda. Namun, dengan sikap sombong belanda merasa yakin bahwa republik sudah hampir ambruk, resolusi tersebut tidak ditaati. Oleh Amerika karena resolusi pertama masih dianggap lunak. Maka dikeluarkan resolusi kedua yang lebih tegas, sebagaimana yang dikutip oleh Moedjanto, (2003:394) isi resolusi Dewan Keamanan PBB adalah sebagai berikut :

1. Mendesak Belanda untuk dengan segera dan sungguh-sungguh menghentikan seluruh operasi militernya dan mendesak pemerintah RI untuk menghentikan aksi kesatuan-kesatuan gerilya

2. Mendesak Belanda untuk melepaskan dengan cara tanpa syarat Presiden dan Wakil Presiden RI beserta tahanan politik yang ditahan sejak 17 Desember 1948 serta memulihkan pemerintahan RI-Yogya
3. Mengajukan agar RI dan Belanda membuka kembali perundingan atas dasar perjanjian Linggarjati dan Renville
4. Sebagai tambahan dari keputusan DK, KTN diubah menjadi komisi PBB untuk Indonesia (*United Nations Commission for Indonesia*)

Sampai bulan April 1949 Belanda masih mempertahankan dominasinya di Indonesia resolusi PBB terus dielak dengan beragam cara. Namun kondisi politik di Amerika terus berubah ternyata ada sekelompok organisasi yang mendesak pemerintah Amerika. Menurut Moedjanto, (2003:398) perhimpunan Buruh Amerika yang tergabung dalam CIO (*Congres of Industrial Organisations*) organisasi ini beranggotakan sekitar 6 juta orang mereka mendesak agar pemerintah Amerika untuk menghentikan serangan Belanda di Indonesia dengan sanksi kalau Belanda menolak, Amerika harus menghentikan bantuan Marshall.

Simpati untuk Indonesia semakin meluas di Internasional kali ini Pers Amerika. Menurut Moedjanto, (2003:398) kolumnis Lippman mengkritik Barat dan membela Indonesia dengan menyebutkan, “alangkah tidak bijaksananya bila Barat dan sekutu mempertahankan mati-matian kemerdekaan sementara di Asia mempertahankan penjajahan”. Kemudian di Kongres Partai Amerika datang simpatisan dari partai oposisi yaitu partai republik 9 Senator Partai Republik di bawah pimpinan Owen Brewster pada 7 Januari 1949 mengeluarkan pernyataan yang pada intinya, Amerika supaya menghentikan segala bantuan kepada Belanda sampai negeri tersebut menghentikan permusuhan dengan RI. Isi pernyataan partai republik hampir sama dengan resolusi yang dikeluarkan oleh DK PBB.

Perjanjian Roem-Royen lahir karena ada itikad baik Amerika, PBB yang membentuk komisi Jasa Baik untuk memfasilitasi Indonesia dengan Belanda agar menyelesaikan konflik yaitu Gencatan Senjata. Perundingan dilakukan pada tanggal 14 April 1949 sementara penandatanganan Persetujuan ini dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 1949 dengan difasilitasi oleh Amerika, sementara Belanda diwakili oleh Belgia dan Indonesia diwakili oleh Australia. Persetujuan ini bertempat di Hotel Des Indes Jakarta dengan adanya persetujuan Roem-Royen tersebut maka berakhirilah konflik bersenjata antara Indonesia dengan Belanda. Ini membuktikan bahwa jalur diplomasi memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan Kemerdekaan Republik Indonesia tanpa kita menafikan perlawanan gerilya yang dilakukan oleh Tentara Nasional kita.

Adapun bunyi kawat sebagaimana yang dijelaskan oleh Agung dalam Budiman, (2017:94) tersebut adalah sebagai berikut:

“Komisi jasa-jasa baik (KTN) menyerukan dengan sangat kepada Dewan Keamanan PBB supaya peperangan di Indonesia yang berarti pelanggaran terhadap persetujuan gencatan senjata yang ditandatangani pemerintah Belanda dan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal Renville ditinjau (diteliti) dengan sangat mendesak”.

Perundingan Roem-Royen membawa dampak positif bagi kedudukan Indonesia dimata dunia, hasilnya adalah kembali ibukota Yogyakarta sebagai Ibukota Indonesia, para pemimpin republik yang ditangkap kembali dari pembuangan. Sementara Syafruddin Prawiranegara selaku Ketua PDRI mengembalikan mandatnya kepada Presiden Sukarno. Sehingga roda pemerintahan kembali berjalan dengan normal. Sudirman yang sejak awal tidak setuju terhadap perjanjian Roem-royen menerima dengan legowo, ketika Istana Yogyakarta dikosongkan pihak Belanda.

Menurut Sundhausen, (1986:79-80) bahwa Pada tanggal 30 Juni 1949 Belanda menarik diri dari wilayah Yogyakarta kemudian pada 6 Juli 1949 Belanda mengembalikan kedaulatan Indonesia dari upaya penjajahan Belanda. Sementara panglima Sudirman masuk Ibu kota pada

tanggal 10 Juli 1949. Dengan sendirinya pemerintahan Indonesia mulai stabil dan Hatta mulai membentuk kabinet baru.

Menurut Hatta, (2011:216-217) bahwa pada tanggal 13 Juli 1949 Mr. Syafruddin Prawiranegara mengembalikan mandat yang diberikan oleh Perdana Menteri. Kemudian sebelumnya telah disepakati bahwa BFO dan republik akan mengadakan Konferensi Inter-Indonesia yang menghasilkan :

1. Negara Indonesia Serikat menjadi RIS
2. Bendera Merah Putih disahkan
3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan disahkan
4. Lagu "Indonesia raya" disahkan
5. 17 Agustus diakui sebagai hari nasional.

Pasca Kemerdekaan penuh Indonesia setelah Perjanjian KMB Indonesia mulai menerapkan politik bebas aktif yang bermakna tidak akan terikat kepada kedua blok yang sedang melakukan perang dingin yaitu Amerika vs Soviet. Namun, setelah tahun 1960an Indonesia mulai condong ke Komunis Internasional yaitu Uni Soviet dan China. Efek dari politik Indonesia yang condong ke kiri melahirkan peristiwa Gerakan Tiga Puluh September 1965 dan perang saudara di pulau Jawa dan Bali. Setelah berakhirnya kepemimpinan Sukarno dengan Mazhab Nasionalis, Komunis Agama sebagai keseimbangan politik, namun tidak bertahan lama. Kekuasaan politik beralih ke tangan perwira militer yang cakap dengan membawa konsep Orde Baru yang memfungsikan militer di seluruh aspek kehidupan sosial. Orde Baru dengan gaya politik ramahnya mencoba membangun kembali hubungan diplomasi dengan Malaysia sebagai saudara Jiran.

KESIMPULAN

Sikap politik elit Indonesia beragam kelompok pertama yaitu pemerintah lebih mengedepankan jalur politik diplomasi ketimbang perlawanan bersenjata atau merdeka 100 persen. Sikap kelompok pertama ini lebih dipengaruhi pendidikan yang mereka peroleh sejak menempuh pendidikan di Belanda, di antara kelompok pertama adalah; Hatta, Syahrir, Setiadjudi, Abdul Majid dan Amir Syarifuddin serta Agus Salim. Kelompok ini berkeyakinan bahwa secara de jure Belanda memang masih kuat dan mendapat dukungan dari sekutunya seperti Inggris dan Amerika. Sementara, kelompok kedua adalah yang memilih cara perlawanan bersenjata atau gerilya dalam mencapai kemerdekaan 100 persen di antara kelompok ini adalah lebih banyak dari tokoh oposisi dan militer seperti Tan Malaka, Panglima Sudirman dan pimpinan-pimpinan partai Masyumi maupun PNI. Pertentangan ini menyebabkan Sudirman memilih Gerilya sebagai cara yang tepat untuk mencapai merdeka seratus persen.

Konflik Indonesia dan Belanda pada akhirnya memerlukan keterlibatan Amerika dalam menyelesaikan sengketa kedua negara tersebut. Ini dibuktikan Amerika kedua kali mengeluarkan resolusi PBB untuk menekan Belanda agar mau menyerahkan kedaulatan kepada republik Indonesia walaupun dengan syarat tertentu seperti Belanda belum mengakui negara-negara bagian milik RI serta Papua. Kemudian kemerdekaan Republik Indonesia masih ada sisa utang kepada Belanda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Firmansyah. (2011). *SM Kartosuwiryo: Biografi Singkat 1907-1962*. Yogyakarta : Garasi.
- Budiman, A. (2019). Sejarah Diplomasi Roem-Roijen dalam Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1949. *Jurnal Wahana Pendidikan*, 4(1), 86-112.

- David Charles Anderson. (2008). *Kudeta Madiun 1948: Kudeta atau konflik internal Tentara*. Yogyakarta : MedPress.
- Hakim, Lukman. (2018). *Para Tokoh Muslim mengawal NKRI*. Jakarta : Al-Kautsar.
- Hatta, Mohammad. (2011). *Untuk Negeriku, Menuju Gerbang Kemerdekaan*. Jakarta : Kompas.
- Saragih, H. M. (2018). Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Konflik Laut China Selatan. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. VIII (1). https://kemlu.go.id/portal/id/read/47/tentang_kami/momen-penting-dalam-sejarah-diplomasi-indonesia diakses pada tanggal 05 Desember 2020.
- Kahin, George McTurnan. (2013). *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Jakarta : Komunitas Bambu.
- Moedjanto, G. (2003). *Dari Pembentukan Pax Neerlandica sampai NKRI*. Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma.
- Andika, M. T., & Aisyah, A. N. (2017). Analisis Politik Luar Negeri Indonesia-China Di Era Presiden Joko Widodo: Benturan Kepentingan Ekonomi Dan Kedaulatan?. *Indonesian Perspective*, 2(2), 161-179.
- Ricklefs, M.C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta : Serambi Mekah.
- Soe Hok Gie. (2005). *Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan*. Yogyakarta : Bintang.
- Sudhaussen, Ulf. (1986). *Politik Militer Indonesia 1945-1967 menuju Dwifungsi ABRI*. Jakarta : LP3S.
- Suryanegara, Ahmad Mansyur. (2016). *API sejarah Jilid II*. Bandung : Surya Dinasti.
- Tempo. (2017). *Soedirman: Seorang Panglima, Seorang Martir*. Jakarta : KGP.
- Tempo. (2017). *Syahrir: Peran Besar Bung Kecil*. Jakarta : KPG.